

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polrestabes Semarang sangat meresahkan masyarakat, pasalnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh para komplotan pencuri dilakukan dengan cara kekerasan. Pelaku kriminal tidak segan-segan melukai korban apabila melakukan perlawanan kepada para pelaku. Berbagai upaya telah dilakukan, namun angka kriminalitas khususnya pencurian yang disertai dengan kekerasan, masih marak terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Persoalan tindak pidana pencurian ini harus menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk melakukan tindak khusus guna mencegah dan menanggulangi berbagai tindak kriminal yang terus terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang sehingga rasa aman dan nyaman dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*juridis normatif*) dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komperhensif tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan / curas di wilayah hukum Polrestabes Semarang dipicu oleh berbagai faktor, akan tetapi faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya pencurian disertai dengan kekerasan / curas adalah faktor ekonomi dan faktor sosial / pergaulan dimana pelakunya banyak melibatkan remaja yang terpengaruh oleh pergaulan dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan adalah dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat represif dengan melakukan penangkapan dan memproses pelaku dalam sistem peradilan pidana, umumnya para pelaku pencurian dengan kekerasan dijerat dengan Pasal 365 KUHP. Tindakan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang dalam menangani pencurian dengan kekerasan seharusnya diikuti dengan tindakan preventif untuk mencegah lebih banyak terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor :68/Pid B /2015 /PN.Smg telah sesuai karena berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktian sudah cukup apabila berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Hakim juga telah mempertimbangkan fakta dipersidangan dimana majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa.

Kata kunci: *Pencurian, kekerasan*

ABSTRACT

The criminal act of theft in the jurisdiction in Semarang Polrestabes very disturbing society, the article crimes committed by the gang of thieves carried out by violent means. Criminals do not hesitate to injure the victim when resistance to the perpetrators. Various attempts have been made, but the crime rate, especially theft accompanied by violence, rampant in the jurisdiction of Polrestabes Semarang. The issue of the crime of theft this should be a concern of law enforcement officers to perform special acts to prevent and cope with various crimes that continue to occur in the jurisdiction of Polrestabes Semarang so that safety and comfort can be enjoyed by all levels of society. This study uses normative legal (normative) using secondary data law made primary, secondary and tertiary. The data obtained and analyzed qualitatively. Specifications research is descriptive analysis that describe comprehensively about the enforcement of the law by Polrestabes Semarang in tackling the crime of theft accompanied by violence.

The criminal act of theft accompanied by violence / curas in jurisdictions Polrestabes Semarang triggered by a variety of factors, but the most dominant factor resulting in theft accompanied by violence / curas economic factors and social factors / relationships in which the person involved many adolescents are affected by association with the surrounding environment. While law enforcement efforts undertaken by Polrestabes Semarang in tackling the crime of theft accompanied by violence is to take actions that are repressive to arrest and process offenders in the criminal justice system, generally the perpetrators of theft with violence charged under Article 365 of the Criminal Code. Measures of Semarang right trial judge in dealing with theft with violence should be accompanied by preventive measures to prevent further criminal acts of theft with violence and protect people from becoming a victim of crime.

Legal considerations judges in decisions on criminal acts of theft with violence in Decision No. 68 / Pid B / 2015 /PN.Smg have appropriate because it is based on the description of witnesses, evidence and information from the defendant, where the evidence is sufficient if it is based on at least 2 (two) plus the judge's conviction evidence. The judge also has to consider the fact the hearing in which the judge did not find things that can release the defendant from criminal responsibility, both as a justification or an excuse. The judge also has to consider judicial and non-judicial consideration to both defense and criminal penalties for the defendant.

Keywords: Theft, violence